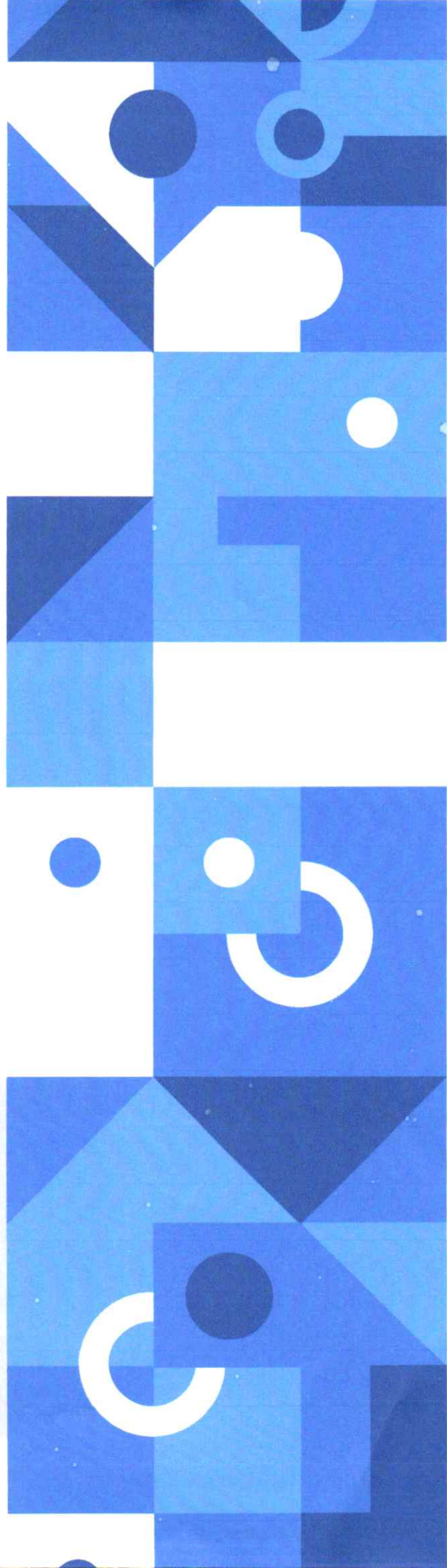




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LKjIP**

**DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA
STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KAB. KUTAI TIMUR
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa sang pemilik hidup, dengan segala keberkahan dan Ridho-Nya sehingga Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggung jawaban kinerja Perangkat Daerah urusan Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas pembangunan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Serta sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik dan berisikan tentang Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta tinjauan secara umum tentang keberhasilan ataupun kegagalan, Permasalahan dan kendala utama, serta strategi pemecahan masalah, sebagai bahan rencana dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja ditahun mendatang.

Semoga laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur ini dapat bermanfaat bagi keberlanjutan dan kesuksesan program pemerintah Kabupaten Kutai timur terutama dalam mensukseskan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur " Mewujudkan Pelayanan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi ".

Demikian LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Tahun 2022 ini kami sampaikan, tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Robbal 'Alamin.

Sangatta, Januari 2023

Kepala Dinas

E. Mulyadi, S.P., MM

Pembina Tk. I / IVb

NIP.197704272001121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
D. Sistematika	3
E. Struktur Organisasi	5
F. Tugas Pokok dan Fungsi	8
G. Kondisi Pegawai	15
H. Aset / Modal	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. Gambaran Umum Perencanaan Strategis Tahun 2016-2021	25
B. Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2022	28
C. Alokasi Anggaran	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
A. Capaian Kinerja Organisasi	44
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	54
C. Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Langkah-Langkah Perbaikan Dalam Rangka Peningkatan Tahun Kinerja Pada Tahun Mendatang	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	16
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	16
Tabel 1.3	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	17
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Kerja Berdasarkan Pendidikan	17
Tabel 1.5	Komposisi Non PNS (TK2D) pada Unit Kerja Berdasarkan Pendidikan	18
Tabel 1.6	Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan tahun 2022	19
Tabel 2.1	Sasaran Strategis – Indikator Kinerja	26
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	30
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran per Program Sebelum Perubahan	38
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis	39
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran per Program Setelah Perubahan	39
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Setelah Perubahan	40
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran Tahun 2022	41
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2022	45
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun sebelumnya	49

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan teknologi sistem informasi dan komunikasi di wilayah Kabupaten Kutai timur merupakan salah satu tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik. Hal ini perlu didukung dengan sistem perencanaan yang baik dan dengan sarana prasarana yang memadai sehingga mampu tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur, merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur sebagai Dinas teknis penyelenggara urusan kominfo dalam mendukung salah satu misi bupati kutai timur untuk “mewujudkan pemerintahan yang berpartisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi”.

Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tanggung jawabnya selalu mengacu kepada arah kebijakan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika serta kebijakan daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sehingga di wilayah kabupaten Kutai Timur dapat tercipta kehidupan sosial bermasyarakat yang terpenuhi dengan Teknologi Informasi dan terwujudnya pemerintahan yang berbasis Elektronik dan pemerintahan yang Good Governance.

Realisasi pencapaian realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur untuk periode per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 49.242.796.942,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 53.850.801.432,- yang memiliki persentasi 91,44% . Secara umum pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 bisa dinyatakan “berhasil”. Pencapaian keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik tahun 2022 juga dapat ditunjukkan dengan beberapa penghargaan yang diperoleh :

1. Top Leader On Digital Implementation 2022 yang diberikan kepada Bapak Ardiansyah Sulaiman selaku Bupati Kabupaten Kutai Timur.

2. Top Digital Implementation 2022 (Bintang 4 = Sangat Baik) diberikan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah mengimplementasikan teknologi digital berupa infrastruktur pendukung teknologi digital.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur, kedepannya akan terus dilakukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi, baik di Dinas pusat maupun instansi di daerah dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator kinerja hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Sangatta, Januari 2023

Kepala Dinas


Ery Mulyadi, S.P., MM
Pembina Tk.I / IVb
NIP.19770427 200112 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah No 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah wajib mempertanggung jawabkan kinerja atau hasil capaian setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Penyusunan LKjIP Dinas Komonikasi Informatika Persandian dan Statistik secara transparan dan akuntabel merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah kepada masyarakat sebagai pemberi amanah untuk memeberikan pertanggung jawaban. Dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh suatu instansi pemerintah, penggunaan teknologi informasi sudah menjadi kewajiban mengingat penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan good governance yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan proses tersebut diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah dimaksud diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang informatika sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi, disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi, persandian dan statistik. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah

dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan sistem pertanggungjawaban yang jelas terukur.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja melalui proses penyusunan Rencana Kerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Capaian Kinerja :

1. Merupakan acuan dalam menyusun perencanaan kegiatan organisasi perangkat daerah pada tahun berikutnya.
2. Merupakan barometer/tolak ukur keberhasilan/kegagalan organisasi perangkat daerah dalam mengemban wewenang serta menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja :

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya.
2. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur Atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas komunikasi Informatika persandian dan statistik kabupaten Kutai Timur.
3. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur.
4. Sebagai Upaya yang berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi informatika persandian dan statistik dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Capaian Kinerja adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
7. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur.

D. Sistematika

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur selama Tahun Anggaran 2022. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Adapun sistematika penyusunan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan terkait dengan pertanggungjawaban kinerja, terdiri dari :

a. Capaian Kinerja Organisasi

Menjelaskan analisis capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan pertanggung jawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2022.

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- c. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

E. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Kabupaten Kutai Timur eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

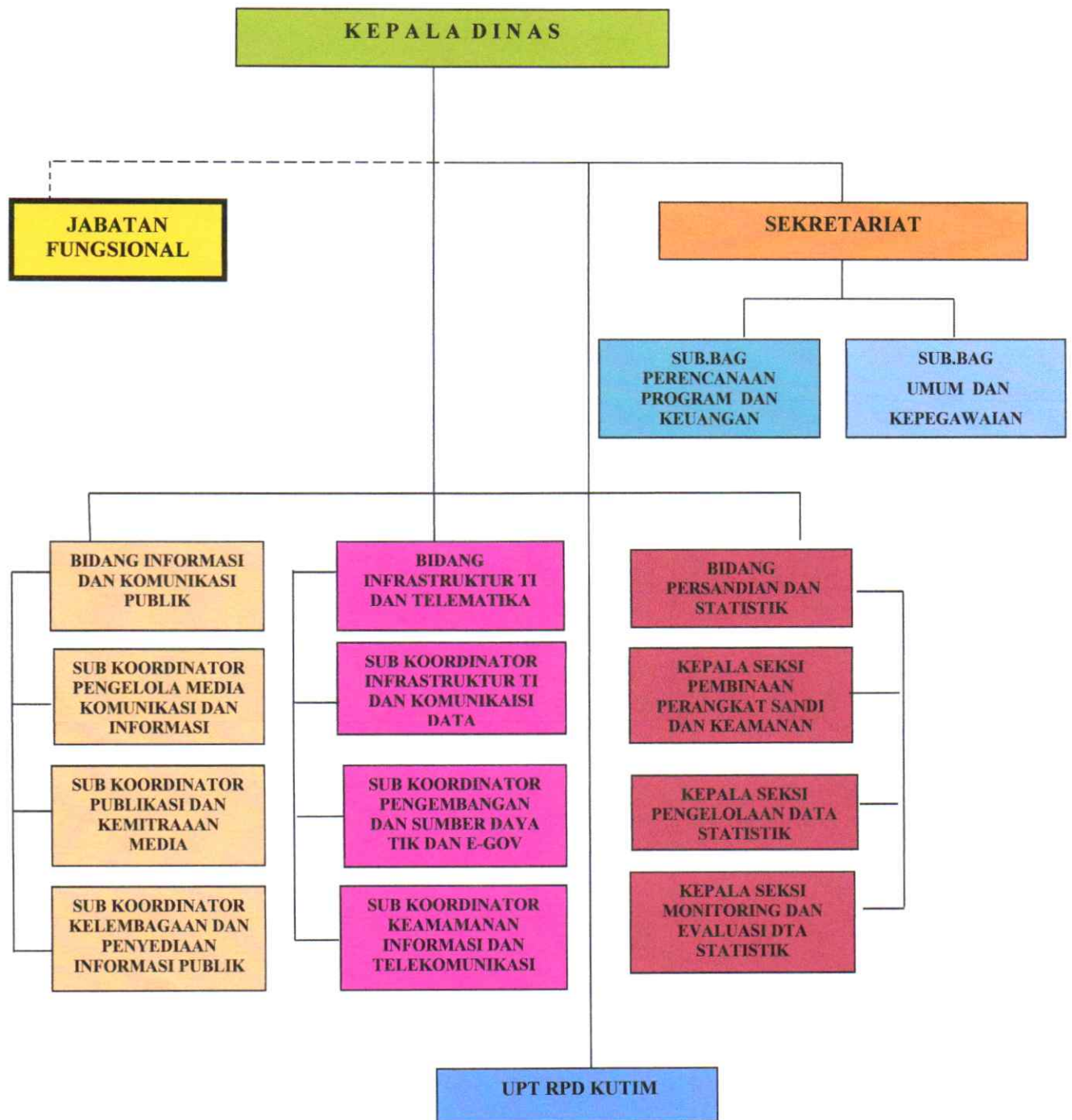
Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur disusun sesuai dengan satuan Kinerja Eselon yang terdiri dari Kepala Dinas (Eselon IIb), Sekretaris (Eselon IIIa), dan 3 Kepala Bidang (Eselon IIIb). Sekretaris membawahi 2 Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 3 Kepala Sub Bidang (Eselon IVa).

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi
 - b. Sub Koordinator Publikasi dan Kemitraan Media
 - c. Sub Koordinator Kelembagaan Informasi dan Penyediaan Informasi Publik
4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika
 - a. Sub Koordinator Infrastruktur dan Komunikasi Data
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya dan E-Government
 - c. Sub Koordinator Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
5. Bidang Persandian dan Statistik
 - a. Seksi Pembinaan, Perangkat Sandi dan Keamanan Data
 - b. Seksi Pengelolaan Data Statistik
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Data Statistik
6. UPTD Radio Pemerintah Daerah Kab. Kutim

Secara rinci susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik:



F. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 26 tahun 2016, uraian tugas dan fungsi pejabat struktural di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok

Menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Statistik Publik;
3. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang penyelenggaraan e-Government;
4. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Persandian dan Statistik;
5. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

II. Sekretaris

a. Tugas Pokok

Pokok membantu kepala dinas dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan sarana prasarana.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan laporan serta keuangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum;

3. Kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan;
4. Pembinaan, pengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
5. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

2.1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

a. Tugas

Melakukan penyusunan dan laporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas serta administrasi keuangan.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

2.2. Sub bagian umum dan kepegawaian

a. Tugas

Melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, pengelolaan sarana prasarana, administrasi kepegawaian.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

III. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

a. Tugas

Melaksanakan penyusunan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi

3.1. Sub Koordinator Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi

a. Tugas

Melaksanakan kegiatan Pengelolaan informasi dan pemanfaatan media komunikasi secara efektif dalam rangka peningkatan kapasitas komunikasi dan penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat secara timbal balik.

b. Fungsi

1. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
2. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan media komunikasi dan informasi;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
4. Pengolahan dan penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
5. Pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral, lingkup nasional dan pemerintah daerah; dan
6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi

3.2. Sub Koordinator Publikasi dan Kemitraan Media

a. Tugas

Membantu Kepala Bidang dalam melakukan publikasi dan kemitraan dengan media dalam rangka mendukung tugas-tugas di Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah.

b. Fungsi

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang publikasi dan kemitraan media;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang publikasi dan kemitraan media;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang publikasi dan kemitraan media;
4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang publikasi dan kemitraan media;
5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang informasi dan komunikasi publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Sub Koordinator Kelembagaan Informasi dan Penyediaan Informasi Publik

a. Tugas

Melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan pemberdayaan Kelembagaan Media Komunikasi dan Informasi serta melakukan pembinaan terhadap kelompok komunikasi sosial masyarakat.

b. Fungsi

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan informasi dan penyediaan informasi publik;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan informasi dan penyediaan informasi publik;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kelembagaan informasi dan penyediaan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan informasi dan penyediaan informasi publik;

5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang informasi dan komunikasi publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika

a. Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, sistem keamanan informasi, dan pengembangan aplikasi telematika.

b. Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang;
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;
4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang; dan
5. Pelaksanaan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

4.1. Sub Koordinator Infrastruktur dan Komunikasi Data

a. Tugas

Melaksanakan kegiatan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan dan komunikasi data melalui penyelenggaraan data centre, pemeliharaan jaringan, peningkatan kapasitas SDM dalam pengembangan infrastruktur, menginventarisasi perangkat keras dan perangkat lunak, spesifikasi pengadaan komputer dan kerjasama teknik berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya jaringan sistem manajemen dan komunikasi data (telematika) yang integral dan up to date.

b. Fungsi

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

4.2. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya dan E-Government

a. Tugas

Melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan telematika, pengembangan aplikasi telematika, pengelolaan nama domain dan sub domain, dan pengintegrasian sistem informasi di lingkup SKPD Kabupaten.

b. Fungsi

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

4.3. Sub Koordinator Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

a. Tugas

Membantu Kepala Bidang Infrastruktur TI dan Telematika, dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan telekomunikasi, pengembangan keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem E-goverment Pemerintah, pelaksanaan audit TIK.

b. Fungsi

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; sesuai tugas pokok dan fungsi; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

V. Bidang Persandian dan Statistik

a. Tugas

Melaksanakan penyusunan program di bidang Persandian dan pengolahan data statistik, monitoring dan evaluasi dan mendokumentasikan data statistik, penyediaan perangkat persandian, layanan keamanan persandian, dan pengolahan data persandian.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

5.1. Seksi Pembinaan, Perangkat Sandi dan Keamanan Data

a. Tugas

Melaksanakan tugas penyediaan perangkat sandi, sistem keamanan sandi, dan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

b. Fungsi

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

5.2. Seksi Pengelolaan Data Statistik

a. Tugas

Melaksanakan tugas di bidang pengolahan data dan statistik.

b. Fungsi

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

5.3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Data Statistik

a. Tugas

Melaksanakan tugas di bidang monitoring, evaluasi dan mendokumentasikan data-data statistik.

b. Fungsi

1. penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi;
2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi

G. Kondisi Pegawai

Dinas Komunikasi dan Informatika Persandiaan dan Statistik Kabupaten Kutai Timur memiliki sumber daya manusia sebanyak 44 orang pegawai negeri sipil, dan Tenaga Kontrak Daerah (TK2D) sebesar 53 orang dengan rincian seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Eselon	Jumlah Formasi	Tingkat Pendidikan				Jumlah
			S2	S1	DIPLOMA	SLTA	
1	II	1 orang	1 orang	-	-	-	1 orang
2	III	4 orang	3 orang	1 orang	-	-	4 orang
3	IV	6 orang	2 orang	4 orang	-	-	6 orang
4.	Non eselon	22 orang	1 orang	16 orang	1 orang	4 orang	22 orang
5	JFT	11 orang	1 orang	10 orang	-	-	11 orang

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Unit Kerja	Pangkat dan Golongan												Jumlah
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Sekretariat	0	2	-	-	1	6	1	2	-	-	-	1	14 orang
2	Bidang Informasi dan komunikasi Publik	1	-	-	-	3	1	1	3	-	-	-	-	9 orang
3	Bidang Infrastruktur TI dan Telematika	3	-	-	-	3	1	4	-	-	-	1	-	12 orang
4	Bidang Persandian dan Statistik	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	7 orang
5	UPT	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3 orang
	Jumlah	4	1	0	-	8	8	7	7	-	0	2	3	44 orang

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Esselon	Jumlah Formasi	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	
II	1 orang	1 orang	-	-	-	-	1 orang
III	4 orang	3 orang	1 orang	-	-	-	4 orang
IV	6 orang	2 orang	4 orang	-	-	-	6 orang
Fungsional	11 orang	1 orang	9 orang	1 orang	-	-	11 orang
Jumah	22 orang	7 orang	14 orang	1 orang	-	-	22 orang

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	Diploma	SLTA	
1	Sekretariat	2 orang	10 orang	-	1 orang	13 orang
2	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 orang	8 orang	-	-	9 orang
3	Bidang Infrastruktur TI dan Telematika	3 orang	8 orang	1 orang	-	12 orang
4	Bidang Persandian dan Statistik	1 orang	3 orang	-	3 orang	7 orang
5	Kepala UPT RPD	1 orang	2 orang	-	-	3 orang
	Jumlah	7 orang	31 orang	1 orang	4 orang	44 orang

Tabel 1.5

Komposisi Non PNS (TK2D) pada Unit Kerja berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan (Bidang Studi)	Jumlah
I. Sekretariat		
1.	S2 – Administrasi Publik	1 orang
2.	S1 – Manajemen	3 orang
3.	S1 – Ekonomi	1 orang
4.	S1 – Agroteknologi	1 orang
5.	S1 – Akutansi	1 orang
6.	S1 – Teknologi Pendidikan	1 orang
7.	S1 – Psikologi	1 orang
8.	S1 – Ekonomi Syariah	1 orang
9.	SMK – Teknik Informatika	1 orang
10.	SMK - IPA	1 orang
11.	SMK – Administrasi Perkantoran	1 orang
	Jumlah	15 orang
II. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		
1.	S1 - Ekonomi	1 orang
2.	S1 – Akutansi	1 orang
3.	S1 – Manajemen	1 orang
4.	S1 – Agroteknologi	1 orang
5.	S1 - Administrasi Niaga	1 orang
6.	S1- Teknik Mesin	1 orang
7.	S1 – Kelautan	1 orang
8.	S1 – Hukum	1 orang
9.	SMK – Teknik Konstruksi Beton dan Bangunan	1 orang
10.	SMA – IPA	2 orang
11.	SMK – Teknik Komputer Jaringan	1 orang
	Jumlah	12 orang
III. Bidang Infrastruktur TI dan Telematika		
1.	S1 - Teknik Informatika	3 orang
2.	S1 - Kelautan	1 orang
3.	S1 - Pendidikan	1 orang
4.	S1 - Teknik Elektro Telekomunikasi	1 orang
5.	D3 - Manajemen Informatika	1 orang
6.	D3 - Teknik Informatika	1 orang
7.	SMK - Keperawatan	1 orang
8.	SMA – IPS	1 orang
	Jumlah	10 orang

IV.	Bidang Persandiaan dan Statistik	
1.	S1 - Pendidikan Agama Islam	1 orang
2.	S1 - Pendidikan Biologi	1 orang
3.	S1 - Pendidikan Teknologi Bangunan	1 orang
4.	S1 - Management	1 orang
5.	S1 - Ilmu Komunikasi	1 orang
6.	S1 – Teknik Informatika	1 orang
7.	SMK - Mekanik Otomotif	1 orang
8.	SMK - Teknik Komputer	1 orang
	Jumlah	8 orang
V.	Kepala UPT Radio Pemerintah Daerah (RPD)	
1.	S1 - Manajemen	1 orang
2.	S1 - Peternakan	1 orang
3.	S1 - Pendidikan Agama Islam	1 orang
4.	S1 - Ilmu Administrasi Negara	1 orang
5.	D3 - Management	1 orang
6.	SMK – Otomotif	1 orang
7.	SMA – IPS	1 orang
	Jumlah	7 Orang

H. Asset / Modal

Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur didukung oleh sumber daya asset / modal yang tercatat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6 Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Tahun 2022

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Keterangan
		Kurang	Cukup	
1	Mesin Ketik Manual Portable		√	7 Unit
2	Printer		√	50 Unit
3	AC		√	16 Unit
4	Access Point		√	5 Unit
5	Alat Kantor Lainnya (Beraket)		√	5 Unit
No.		Kondisi		Keterangan

	Jenis Sarana dan Prasarana	Kurang	Cukup	
6	Alat Potong Kertas		√	7 Unit
7	Alat Perekam Suara (Recorder)		√	8 Unit
8	Alat Studio Lainnya		√	3 Unit
9	Alat Studio Video Lainnya		√	4 Unit
10	Almari Arsip Dinamis		√	27 Unit
11	Aruba/Switch		√	5 Unit
12	Audio Mixing Console		√	3 Unit
13	Audio Monitoring Unit		√	1 Unit
14	Audio Processor Am		√	1 Unit
15	Baggage Trolley		√	2 buah
16	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		√	1 buah
17	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)		√	1 buah
18	Baterai 100 ah (baterai untuk BTS)		√	12 Unit
19	Bateray Pack Camera		√	1 buah
20	Tower/ Menara Desa Rantau		√	1 Unit
21	Brand Kas		√	5 Unit
22	Kamera Digital		√	3 buah
23	Camera Electronic		√	3 unit
24	Camera Electronic		√	1 buah
25	Camera Video		√	1 set
26	Carrying/Storage Case		√	16 unit
27	Clipp On		√	3 Unit
28	Dispenser		√	2 buah
29	External/ Portable Hardisk		√	3 Unit
30	Genset		√	1 Unit

31	Gimbal Stabilizer (Alat Studio Video Lainnya)		√	1 Unit
32	GPS		√	3 Unit
33	Handy Talky (HT)		√	1 unit
34	Handycam		√	1 paket
35	Head Set		√	1 unit
36	Instalasi Listrik dan Lampu		√	1 buah
37	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Lain-lain		√	1 buah
38	Instalasi Penangkal Petir Manual		√	4 buah
39	Intercom Unit		√	1 buah
40	Jaringan Fiber Optik		√	2
41	Kabel UTP Cat.6		√	5 buah
42	Kamera Udara		√	3 buah
43	Kanopi Tempat Parkir Roda 4		√	3 buah
44	Karpet		√	7 buah
45	Kendaraan Road 4		√	3 unit
46	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)		√	4 buah
47	Kursi Kerja (Biasa)		√	10 buah
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		√	15 buah
49	Kursi Rapat		√	15 buah
50	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III		√	6 set
51	KVM Keyboard Video Monitor		√	2 buah
52	Lampu Blitz Kamera		√	3 buah

53	Lap Top		√	31 unit
54	LCD Projector/Infocus		√	4 buah
55	Lemari Besi/Metal		√	14 buah
56	Lemari Es		√	6 unit
57	Lemari Kayu		√	3 buah
58	Lemari Set		√	2 set
59	Lensa Kamera		√	3 buah
60	Lighting Head Body		√	1 buah
61	Loudspeaker		√	1 buah
62	Meja Kursi Kerja (MOUBILER LAINNYA)		√	1 buah
63	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III		√	6 buah
64	Mesin Pemotong Rumput		√	2 unit
65	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		√	4 unit
66	Microphone		√	3 buah
67	Mini Komputer		√	4 unit
68	Monitor		√	3 buah
69	Note Book		√	6 buah
70	Optical Power Meter		√	2 buah
71	P.C Unit		√	46 unit
72	Pembangunan Jaringan Tower/Menara Desa Beno Harapan Kec. Batu Ampar		√	1
73	Pengadaan Perangkat Video Conference dan Peralatan Lainnya (Alat Komunikasi Lain-lain)		√	1
74	Peralatan Jaringan Lain-lain		√	1
75	Peralatan Jaringan lainnya		√	3

76	Peralatan Jaringan lainnya Akses Poin Internet		√	2
77	Peralatan Personal Komputer lainnya Mouse wireless bluetooth		√	4
78	Rak Besi		√	1 buah
79	Room Humidifier		√	1 buah
80	Router		√	8 buah
81	Rumah Genset		√	1
82	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		√	16 unit
83	Sepeda Motor		√	4 unit
84	Serial Printer		√	1
85 86	Server		√	2
87	SFP LC LX / Peralatan Jaringan Lainnya		√	5
88	Stabilizer		√	1
89	Switch manageable		√	2
90	System/Power Supply Lainnya (dst)		√	2
91	Tablet PC		√	13 unit
92	Tangga Alumunium		√	1 buah
93	Telephone Mobile		√	6 unit
94	Televisi		√	12 unit
95	Tempat Parkir		√	1
96	Terekam dan bentuk mikro lainnya		√	2
97	Tripod Camera		√	6 buah
98	Unintemuptible Power Supply (UPS)		√	28

99	Video Mixer		√	2
100	Videotron		√	2
101	Wireless		√	1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026

Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur mendukung pencapaian misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur pada Misi 4 : “Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif berbasis Penegakan Hukum Dan teknologi Informasi”. Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur periode 2021-2024 dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam rencana strategis yang menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan selama 5 tahun.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2024 adalah “Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”. Kutai Timur yang memiliki daerah yang luas, dengan sebaran penduduk yang tersebar mulai dari wilayah perkotaan dan dipelosok pedesaan menjadi kendala dalam pelayanan publik. Oleh karena itu dengan adanya Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik diharapkan akan dapat menjalankan perannya dalam mengatasi kendala tersebut dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang karenanya tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sedangkan sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya

organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis – Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya komitmen dan integritas Aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja) yang disusun Jumlah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Yang Disusun Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Yang Disusun Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji TK2D Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Yang Disusun Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya Barang Administrasi Perkantoran dan Jasa Pendukung Lainnya Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah rapat dan perjalanan dinas, koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah rapat dan perjalanan dinas, koordinasi dan konsultasi luar daerah Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Pengamanan Informasi Jumlah jasa dan administrasi kantor yang disediakan

2	Terwujudnya penyebaran informasi bagi masyarakat.	Jumlah Informasi Publik Kabupaten Kutai Timur Yang Disediakan Jumlah informasi yang disampaikan melalui siaran TV Jumlah penyebaran Informasi Publik Jumlah Konten Informasi Yang Diupload Melalui Media Online Jumlah Penyebaran Informasi Publik Melalui Website Kutai Timur Jumlah Informasi Publik yang disajikan melalui Media Massa Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah Informasi Yang Disampaikan Melalui Radio / UPTD RADIO RPD
		Jumlah Media Penyebaran Informasi Jumlah Media Penyebaran Informasi Publik pada OPD (Web PPID) Jumlah Peralatan Pendukung Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Yang Disediakan Tersedianya Layanan Tunggal Panggilan Darurat
3	Meningkatnya penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat	Jumlah OPD Yang Terkoneksi Jaringan Fiber Optik Jumlah Peningkatan Akses Internet OPD Tersedianya Akses Internet Desa Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Standarisasi Infrastruktur Telematika Jumlah Peserta Diklat / Bimtek Jaringan TIK Pembinaan, Pengawasan dan Perijinan Bidang Telekomunikasi

4	Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang lengkap dan akurat	Meningkatnya Tata Kelola Statistik Sektoral Tersedianya Webbessed Sistem Informasi Statistik Tersedianya Infrastruktur Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tersedianya Webbessed Sistem Informasi Statistik Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan data Pertumbuhan Ekonomi yang Lengkap, Terbaru dan Akurat Tersusunnya Data Statistik Sektoral dan Infografis
5	Terselenggaranya Urusan Persandian	Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat/Publik yang Mendapatkan Literasi Keamanan Informasi Perencanaan Keamanan Informasi dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Keamanan Informasi Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kepada Seluruh OPD dan Instansi Vertikal Tersedianya dasar-dasar Hukum / Peraturan Dalam Pelaksanaan Persandian daerah Kabupaten Kutai Timur Tersedianya data Informasi baik Jumlah, Jenis, Urusan serta Asset Yang Wajib Diamankan dengan Persandian di Kab. Kutai Timur Tersedianya Dokumen Grand Design Persandian Daerah

B. Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil maka perlu dibuat sebuah Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang bersangkutan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik
Kabupaten Kutai Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya komitmen Dan Integritas Aparatur dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik		A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	
			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Tersedianya Jumlah Dokumen Renja (Renja) yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen
		Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD		1 dokumen
		Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen
		Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang
		Tersedianya Gaji TK2D	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	67 orang
		Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Keuangan	Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	14 orang
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	2 dokumen

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Diskominfo Kutai Timur Tahun 2022

		Tersedianya Laporan Keuangan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Tepenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	115 stel
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30 orang
		Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat		4 Orang PIM III dan IV
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan serta Meningkatnya Pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-
			4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Tersedianya Scenner	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit
		Tersedianya Alat Tulis Kantor		35 Jenis
		Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 item
		Terpenihunya Peralatan Dapur		10 kali
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-
		Makan Minum Rapat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	5 kali
		Terlaksananya Kegiatan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi		2 kali

			5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Terpenuhinya/tercukupinya kebutuhan akan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun
		Honor Kebersihan		1 tahun
		Honor Pengelola Arsip		1 tahun
		Honor Wakar		1 tahun
		Biaya Internet		1 tahun
		Biaya Sumber Air dan Listrik		1 tahun
		Honor Aplikasi Pemerintah		4 bulan
		Honor Operator Komputer		2 bulan
		Honor Pengelola Caraka		1 tahun
			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun
		Terpeliharanya Kendaraan Roda Dua		2 unit
		Terpeliharanya Kendaraan Roda Empat		2 unit
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2 Kendaraan Roda 4, 2 Unit Roda 2

		Biaya STNK, BBM		400 liter
		Terpeliharanya AC	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	8 unit
		Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Saluran Pembuangan air (Parit), Pemasangan Partisi, dll
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target
2	Terwujudnya penyebaran informasi bagi masyarakat.		B. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
		Terlaksananya Pemantauan Isu Publik dan Layanan Aduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!)	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Paket Dokumen
		Evaluasi Penggunaan Media	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen
		Penyelenggaraan Media Komunikasi Publik		5 jenis media
		Terlaksananya Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online dan Elektronik		750 Tayang
		Penyusunan Strategi Komunikasi Publik dan Pengemasan Konten		365 kali
		Penanganan Pengelola dan Evaluasi Komunikasi Krisis		Layanan Pengaduan Publik 57 OPD
		Terlaksananya Fungsi PPID	Pelayanan Informasi Publik	1 Paket Dokumen
		Terlaksananya Fungsi PPID		15 opd

		Meningkatnya SDM Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		15 orang
		Terlaksananya Pengelolaan Media dan Penyebaran Informasi Melalui Media	Layanan Hubungan Media	300 kali
		Pengembangan Media Komunikasi Milik Daerah (RPD Kutim)		5 Kecamatan
		Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	-
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dikelola Pengembangan dan Pemberdayaan		5 km
		Tersedianya Layanan Tunggal Panggilan Darurat	Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1 unit
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik		1 Billboard
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik		11 opd
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik		5 OPD, 1 Billboard, 1 Unit Layanan Call Center
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target
3.	Meningkatnya penyebaran Teknologi Informasi		C. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	

dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat		1. Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
	Jumlah SKPD yang punya Website		Semua OPD
	Terkasananya Pengawasan dan Penertiban Sub Domain		Semua OPD
	Tersedianya Perangkat Jaringan TIK/LAN/DC	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7 Paket Perangkat TIK/LAN/DC
	Tersedianya Peralatan/Perangkat Jaringan TIK		1 Unit
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengawasan Pemerintahan secara Elektronik		Semua OPD
	Tersedianya Koneksi antar OPD melalui Jaringan Fiber Optik (FO)		0 OPD
		2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kabupaten / Kota	
	Jumlah Kapasitas Bandwith yang dikelola Diskominfoeristik	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	300 MBPS
	Jumlah OPD yang menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah		13 opd
	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik		2 dokumen
	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Laporan
	Tersedianya Aplikasi Layanan Pemerintah	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 Aplikasi

		Jumlah Infrastruktur TIK yang disediakan	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	13 VSAT
		Jumlah Layanan yang terintegrasi		126 Layanan Terintegrasi
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Inovasi yang mendukung Smart City	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	0 OPD
		Terselenggaranya Sosialisasi, Koordinasi dan Evaluasi Smart City		4 kali
		Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan untuk Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat dan Profesionalisme SDM TIK Masyarakat dan Aparatur	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 kali
		Tersedianya Laporan Monev Pengembangan Ekosistem SPBE		1 dokumen
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target
4.	Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang Lengkap dan Akurat./		D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten / Kota	
		Jumlah OPD yang Terintegrasi dalam Portal Satu Data	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	5 OPD
				2 dokumen
		Penguatan Kelembagaan Forum Satu Data Kabupaten Kutai Timur		6 kali

		Persentase OPD yang Menyediakan Data Statistik Sektoral		-
		Pengembangan Portal Satu Data Setiap Tahun	Pengembangan Infrastruktur	5 OPD
		Jumlah Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Statistik Sektoral		1 dokumen
5.	Terselenggaranya Urusan Persandian		E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
		Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah daerah Kabupaten / Kota	2 dokumen
			F. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1 dokumen
			1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan	
		Pengembangan Media Komunikasi Milik Daerah (RPD Kutim)	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 kecamatan
		Tersedianya data Informasi baik Jumlah, Jenis, Urusan serta Asset Yang Wajib Diamankan dengan Persandian di Kab. Kutai Timur	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah daerah Kabupaten / Kota	1 dokumen

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2022 tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Kutai Timur sebelum perubahan sebesar **Rp. 25.907.922.905,-**. Dalam perjalanan tahun anggaran 2022 sehingga terjadi rasionalisasi anggaran untuk mendukung kegiatan, sehingga setelah perubahan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur sebesar **Rp. 53.850.801.432,-** yang digunakan untuk melaksanakan 35 Kegiatan yang termasuk dalam 5 program sebagai berikut :

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran per Program
Sebelum Perubahan

No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.607.922.905,-	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	5.100.000.000,- 1.100.000.000,-	UPTD RADIO RPD
3	Program Aplikasi Informatika	12.800.000.000,-	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.000.000,-	
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100.000.000,-	
	Total	25.907.922.905,-	

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Ket
1	Meningkatnya Komitmen dan Integritas Aparatur dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	6.607.922.905,-	
2	Terwujudnya penyebaran informasi bagi masyarakat.	6.200.000.000,-	
3	Meningkatnya penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat	12.800.000.000,-	
4	Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang lengkap dan akurat	200.000.000,-	
5	Terselenggaranya Urusan persandian	100.000.000,-	
	Total	25.907.922.905,-	

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran per Program Setelah Perubahan

No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.618.324.322,-	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	13.890.000.000,- 2.500.000.000,-	UPTD RADIO RPD
3	Program Aplikasi Informatika	22.242.477.110,-	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	500.000.000,-	

5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100.000.000,-	
	Total	53.850.801.432,-	

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis
setelah perubahan

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Ket
1	Meningkatnya Komitmen dan Integritas Aparatur dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	14.618.324.322,-	
2	Terwujudnya penyebaran informasi bagi masyarakat.	16.390.000.000,-	
3	Meningkatnya penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat	22.242.477.110,-	
4	Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang lengkap dan	500.000.000,-	
5	Terselenggaranya Urusan persandian	100.000.000,-	
	Total	53.850.801.432,-	

C. Alokasi Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur menurut Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) adalah sebesar **Rp. 53.850.801.432,-**. Anggaran tersebut terdiri atas 5 Program yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Program Informasi dan komunikasi publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik sektoral,

Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi, serta 35 Sub Kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan masing- masing kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Tahun 2022

No	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.618.324.322,-	
1	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	120.000.000,-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	525.000.000,-	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.043.400.000,-	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	1.091.884.322,-	
5	Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	350.000.000,-	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	75.000.000,-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,-	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	250.000.000,-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	500.000.000,-	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.301.800.000,-	

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Diskominfo Kutai Timur Tahun 2022

9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	364.240.000,-	
10	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.040.000.000,-	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000,-	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	125.000.000,-	
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	13.890.000.000,-	
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	400.000.000,-	
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8.790.000.000,-	
3	Pelayanan Informasi Publik	1.900.000.000,-	
4	Pelayanan Informasi Publik UPTD RADIO RPD	2.500.000.000,-	
5	Layanan Hubungan Media	1.550.000.000,-	
6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	200.000.000,-	
7	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.050.000.000,-	
III	Program Aplikasi Informatika	22.242.477.110,-	
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7.185.000.000,-	
2	Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah	3.025.517.110,-	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	50.000.000,-	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.166.960.000,-	
4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	10.430.000.000,-	

	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	335.000.000,-	
5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	50.000.000,-	
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	500.000.000,-	
1	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	100.000.000,-	
2	Pengembangan Infrastruktur	400.000.000,-	
V	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100.000.000,-	
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100.000.000,-	
	Jumlah	53.850.801.432,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran-sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar atau tolak ukur untuk keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur, pengukuran yang dimaksud adalah hasil dari penilaian yang sistematis. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban yang diukur adalah program, kegiatan, dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana program, kegiatan dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antara tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur Menetapkan 5 Program, 11 Kegiatan dan 34 Sub

Kegiatan serta UPTD Radio yang mempunyai 1 Sub Kegiatan. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 dapat dikatakan “berhasil”, yaitu capaiannya 99,6 % dari target yang telah ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Tahun 2022			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Komitmen dan Integritas Aparatur dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik				
	Indikator Kinerja :				
	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
	Tersedianya Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100 %	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	50 Orang	50 orang	100 %	
	Terselenggaranya Gaji TK2D	67 Orang	67 orang	100 %	
	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Keuangan	14 Orang	14 orang	100 %	
	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Dokumen	2 dokumen	100 %	

Tersedianya laporan keuangan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
Terpenuhinya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	115 stel	115 stel	100 %	
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	20 Orang/ diklat	20 Orang/ diklat	100 %	
Tersedianya alat tulis kantor	35 jenis	35 jenis	100 %	
Tersedianya scanner	1 unit	1 unit		
Terpenuhinya Peralatan dan bahan kebersihan	1 jenis	1 jenis		
Honor pengelola arsip	1 tahun	1 tahun		
Honor wakar	1 tahun	1 tahun		
Honor kebersihan	1 tahun	1 tahun		
Terpenuhinya peralatan dapur	11 jenis	11 jenis		
Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	2 kali	2 kali	100 %	
Makan minum rapat	5 kali	5 kali		
Terpenuhinya/tercukupinya kebutuhan akan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	1 tahun	100 %	
Biaya sumber air dan listrik	1 tahun	1 tahun		
Honor pengelola caraka	1 tahun	1 tahun		
Honor operator komputer	2 bulan	2 bulan		
Honor aplikasi pemerintah	4 bulan	4 bulan		
Biaya internet	1 tahun	1 tahun		
Terpeliharanya kendaraan perorangan	1 tahun	1 tahun	100 %	
Terpeliharanya kendaraan roda empat	2 unit	2 unit		
Terpeliharanya kendaraan roda dua	2 unit	2 unit		
Biaya STNK, BBM	400 liter	400 liter		
Terpeliharanya AC	8 Unit	8 unit	100 %	

	Terbangunnya saluran pembangunan air	50 meter	50 meter	100 %	
	Terlaksananya semenisasi jalan kantor				
	Terpasangnya partisi kaca	25 m2	25 m2		
	Terpasangnya wallpaper dinding	50 m2	50 m2		
	Terpeliharanya taman dan Gedung kantor	1 tahun	1 tahun		
	Terlaksananya perencanaan pembangunan	1 perencanaan	1 perencanaan		
2.	Terwujudnya penyebarluasan informasi bagi masyarakat				
	Indikator Kinerja :				
	Terlaksananya pemantauan isu publik dan layanan aduan masyarakat (SP4N-LAPOR!)	1 paket dokumen	1 paket dokumen	100 %	
	Terlaksananya penyebaran informasi publik melalui media online dan elektronik	750 tayang	750 tayang	100 %	
	Penyelenggaraan media komunikasi publik	5 jenis media	5 jenis media		
	Evaluasi penggunaan media	1 dokumen	1 dokumen		
	Terlaksananya penyebaran informasi public melalui media online dan elektronik	365 siaran	365 siaran	100 %	
	Pengembangan media komunikasi milik daerah (RPD Kutim)	5 kecamatan	5 kecamatan		
	Terlaksananya fungsi PPID	1 paket dokumen	1 paket dokumen	100 %	
	Terlaksananya fungsi PPID	15 opd	15 opd		
	Terlaksananya pengelolaan media dan penyebaran informasi melalui media	300 kali	300 kali	100 %	
	Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan KIM	5 kim	4 kim	80 %	
	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	11 opd	11 opd	100 %	
	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	1 billboard	1 billboard		
	Tersedianya layanan tunggal panggilan darurat	1 unit	1 unit		

3.	Meningkatnya penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat			
	Indikator Kinerja :			
	Tersedianya koneksi antar OPD melalui jaringan Fiber Optik (FO)	0 OPD	6 OPD	100 %
	Tersedianya peralatan/perangkat jaringan TIK	1 unit	1 unit	
	Jumlah OPD yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	13 opd	13 opd	100 %
	Jumlah kapasitas bandwidth yang dikelola diskominfo perstik	300 mbps	300 mbps	
	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	1 laporan	1 laporan	100 %
	Tersedianya aplikasi layanan pemerintah	2 aplikasi	2 aplikasi	100 %
	Jumlah layanan yang terintegrasi	126 layanan terintegrasi	126 layanan terintegrasi	100 %
	Jumlah infrastruktur TIK yang disediakan	13 VSAT	13 VSAT	
	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	0 opd	0 opd	100 %
	Terselenggaranya sosialisasi, koordinasi dan evaluasi smart city	4 kali	4 kali	
	Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan profesionalisme SDM TIK masyarakat dan aparatur	1 kali	1 kali	100 %
4.	Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang Lengkap dan Akurat			
	Indikator Kinerja :			
	Jumlah OPD yang terintegrasi dalam portal satu data	5 opd	5 opd	100 %
	Pengembangan portal satu data setiap tahun	5 opd	5 opd	100 %

5.	Terselenggaranya Urusan Persandian				
	Indikator Kinerja :				
	Tersedianya kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi	2 dokumen	2 dokumen	100 %	

Capaian Kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 99,6 %

2. Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun lalu

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun sebelumnya

Sasaran Strategis :						
1.	Meningkatnya Komitmen dan Integritas Aparatur dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik					
	Indikator Kinerja :	Tahun 2021			Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
	Jumlah Dokumen Rencana Kinerja (Renja) yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen
	Jumlah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%		
	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD				1 dokumen	1 dokumen
	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 dokumen	4 dokumen
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				1 dokumen	1 dokumen
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	46 orang	46 orang	100%	50 orang	50 orang
	Terselenggaranya Gaji TK2D	56 orang	56 orang	100%	67 orang	67 orang
	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Keuangan	14 orang	14 orang	100%	14 orang	14 orang
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun yang di susun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen

Tersedianya Laporan Keuangan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 dokumen	1 dokumen	100%
Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14 orang	14 orang	100%	115 Stel	115 Stel	100%
Terlaksananya Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20 Orang/ diklat	20 Orang/ diklat	100%
Tersedianya Alat Tulis Kantor	6 paket	3 paket	50%	20 Buah	20 Buah	100%
Tersedianya Scanner				1 Unit	1 Unit	
Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan				1 Jenis	1 Jenis	100%
Honor Pengelola Arsip				1 Tahun	1 Tahun	100 %
Honor Wakar				1 Tahun	1 Tahun	
Honor Kebersihan				1 Tahun	1 Tahun	
Terpenuhinya Peralatan Dapur				11 Jenis	11 Jenis	
Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	15kali	15kali	100%	2 Kali	2 Kali	100%
Makan Minum Rapat				5 Kali	5 Kali	
Terpenuhinya/tercukupinya Kebutuhan akan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	100 %
Biaya Sumber Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	
Honor Pengelola Caraka				1 Tahun	1 Tahun	
Honor Operator Komputer				2 Bulan	2 Bulan	
Honor Aplikasi Pemerintah				4 Bulan	4 Bulan	

	Biaya Internet				1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah Jasa dan administrasi Kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	100%			100%
	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan	11 unit	11 unit	100%	1 Tahun	1 Tahun	
	Terpeliharanya Kendaraan Roda Empat				2 Unit	2 Unit	
	Terpeliharanya Kendaraan Roda Dua				2 Unit	2 Unit	
	Biaya STNK, BBM				400 Liter	400 Liter	
	Terbangunnya Saluran Pembuangan Air				50 Meter	50 Meter	100 %
	Terlaksananya Semenisasi Jalan Kantor				120 m2	120 m2	
	Terpasangnya Partisi Kaca				25 m2	25 m2	
	Terpasangnya Wallpaper Dinding				50 m2	50 m2	
	Terpeliharanya Taman dan Gedung Kantor				1 Tahun	1 Tahun	
	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan				1 Perencanaan	1 Perencanaan	
2.	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mewujudkan layanan publik yang berbasis TIK						
	Indikator Kinerja :	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Tersedianya Koneksi antar OPD melalui Jaringan Fiber Optik (FO)				0 OPD	0 OPD	100%
	Tersedianya Peralatan / Perangkat Jaringan TIK				1 Unit	1 Unit	
	Jumlah OPD yang menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah	9 OPD	3 OPD	30 %	13 OPD	13 OPD	100 %

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Diskominfo Kutai Timur Tahun 2022

	Jumlah Kapasitas Bandwith yang dikelola Diskominfo perstik				300 MBPS	300 MBPS	
	Tersediannya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				1 Laporan	1 Laporan	100 %
	Tersediannya Aplikasi Layanan Pemerintah				2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%
	Jumlah Layanan yang Terintegrasi				126 Layanan Terintegritas	126 Layanan Terintegritas	100%
	Jumlah Infrastruktur TIK yang disediakan				13 VSAT	13 VSAT	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Inovasi yang Mendukung Smart City				0 OPD	0 OPD	100 %
	Terselenggaranya Sosialisasi, Koordinasi dan Evaluasi Smart City				4 Kali	4 Kali	
	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan untuk Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat dan Professionalisme SDM TIK Masyarakat dan Aparatur				1 Kali	1 Kali	100 %
3.	Terwujudnya penyebaran informasi bagi masyarakat.						
	Indikator Kinerja :	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Terlaksananya Pemantauan Isu Publik dan Layanan Aduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!)				1 Paket Dokumen	1 Paket Dokumen	100 %
	Terlaksananya Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online dan Elektronik	12 Jenis informasi	12 Jenis informasi	100 %	750 Tayang	750 Tayang	100%
	Penyelenggaraan Media Komunikasi Publik				5 Jenis Media	5 Jenis Media	
	Evaluasi Pengguna Media				1 Dokumen	1 Dokumen	
	Terselenggaranya Fungsi PPID				1 Paket Dokumen	1 Paket Dokumen	100%

	Terselenggaranya Fungsi PPID				15 OPD	15 OPD	
	Terlaksananya Pengelolaan Media dan Penyebaran Informasi melalui Media				300 Kali	300 Kali	100%
	Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan KIM				5 KIM	5 KIM	100%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik				11 OPD	11 OPD	100%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik				1 Billboard	1 Billboard	
	Tersedianya Layanan Tunggal Panggilan Darurat				1 Unit	1 Unit	
	Terlaksananya Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online dan Elektronik				365 Siaran	365 Siaran	100 %
	Pengembangan Media Komunikasi Milik Daerah (RPD KUTIM)				5 Kecamatan	5 Kecamatan	
4.	Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang lengkap dan akurat						
	Indikator Kinerja :	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah OPD yang Terintegritas Dalam Portal Satu Data				5 OPD	5 OPD	100 %
	Pengembangan Portal Satu Data Setiap Tahun				5 OPD	5 OPD	100%
5.	Terselenggaranya Urusan Persandian						
	Indikator Kinerja :	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Komitmen dan Integritas Aparatur dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Berdasarkan dari hasil pengukuran kinerja sasaran 1 dan indikator kinerja sebagai tolak ukurnya maka tergambar bahwa secara umum capaian kinerja, indikator kinerja, tercapai kinerja yang telah ditentukan yaitu 100% dari target 2022.

Pencapaian sasaran ini dengan terlaksananya kegiatan penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang berupa pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyusunan dokumen, pelayanan administrasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya jumlah SDM dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sehingga mempengaruhi target waktu penyelesaian pekerjaan yang ada.

Sasaran 2 : Meningkatnya Penyebarluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kepada Masyarakat

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi dan efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai diharapkan terus dipenuhi untuk mendukung implemmentasi SPBE, e-Government dan Penerapan Smart City. Disamping itu dengan adanya isu global yaitu era digital 4,0 yang mengharuskan semua daerah untuk memanfaatkan teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing daerah. Untuk itu dinas kominfo terus berupaya untuk menyiapkan infrastruktur TIK tersebut baik berupa perangkat keras

(Hard Ware) maupun perangkat lunak (Software). Sampai dengan tahun 2022 telah terhubung 28 OPD melalui jaringan Fiber Optik, 34 OPD dan 13 Bagian pada sekretariat Daerah yang sudah hosting Aplikasi di kutaitimurkab.go.id diharapkan kedepan dengan adanya dukungan anggaran semua OPD dapat saling terhubung melalui jaringan Fiber Optik.

2. Peningkatan kapasitas bandwidth untuk mendukung pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar terwujud pelayanan publik yang efektif dan efisien serta dalam peningkatan tata kelola pemerintahan. Kapasitas bandwidth yang dikelola Diskominfo masih belum mencukupi untuk mendukung integrasi sistem informasi/ aplikasi yang ada di OPD. Selama ini belanja internet masih dikelola masing-masing OPD, hal ini kurang efisien sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik antar OPD agar pemanfaatan bandwidth bisa lebih efisien jika pengelolaannya dipusatkan di Diskominfo Perstik.
3. Penambahan Menara telekomunikasi di area yang masih belum terjangkau layanan telekomunikasi masih perlu ditingkatkan untuk meminimalisir area blankspot. Mengingat wewenang pembangunan menara telekomunikasi bukan domain Pemerintah Daerah sehingga perlu koordinasi yang intens dengan pemerintah pusat melalui lembaga penyedia sarana telekomunikasi yaitu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagai solusi untuk meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi. Disamping itu perlu koordinasi juga dengan provider TIK yang ada di Wilayah Kab. Kutai Timur.

Sasaran 3 : Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Bagi Masyarakat

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi dan efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Jumlah KIM yang telah terbentuk ada 3 Kelompok. KIM sebagai media penyampaian informasi dari Pemerintah kepada Masyarakat perlu terus dikembangkan karena melalui KIM, pihak pemerintah dapat bertemu langsung dengan masyarakat sehingga terjalin komunikasi dari dua arah dan informasi yang ingin disampaikan langsung diterima oleh kedua belah pihak.

2. Terlaksananya penyebaran informasi melalui media online dan elektronik dimana pada tahun 2022 telah tayang sebanyak 750 kali, dengan adanya media online sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi. Dinas kominfo juga melakukan penyebaran informasi mealalui live streaming sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kegiatan pemerintahan secara utuh.
3. Peningkatan pelayanan masyarakat khususnya Dalam memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau aduan tentang hal atau suatu kejadian isu publik, dinas kominfo kutai timur juga menyediakan layanan aduan SP4N-LAPOR yang tersedia selama 24 jam setiap harinya.
4. Jauhnya jarak geografis antar kecamatan dan desa sehingga diperlukan waktu dan anggaran dalam proses sosialisasi dan Pemberdayaan KIM, serta peliputan informasi terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun masyarakat di seluruh wilayah kabupaten Kutai Timur.
5. Diperlukan Pemetaan ,pembentukan dan pemberdayaan KIM agar sasaran yang dituju dapat tercapai dan informasi yang diharapkan dapat sampai ke Masyarakat.

Sasaran 4 : Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi Yang Lengkap dan Akurat

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi dan efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Adanya integrasi dan Migrasi seluruh Data-data pembangunan ke dalam suatu sistem informasi satu data.
2. Terselenggaranya koordinasi dengan OPD untuk melengkapi dan mengupdate data-data dibutuhkan agar data-data yang disampaikan dalam sistem informasi statistik akurat dan Akuntabel
3. Peningkatan kapasitas dan jumlah SDM pengelola data pembagian daerah sehingga tata kelola statistik sektoral dapat terintegrasi dengan baik.

Sasaran 5 : Terselenggaranya Urusan Persandian

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi dan efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Dinas komunikasi dan informatika persandian dan statistic sebagai penyelenggara urusan persandian daerah telah menyusun peraturan upati yang menjadi dasar pelaksanaan urusan persandian di Lingkup Kab. Kutai Timur. Namun karena adanya keterbatasan anggaran sehingga sosialisasi pemahaman tentang pentingnya persandian elum dapat dilaksanakan
2. Belum adanya sarana pendukung dalam kegiatan pelaksanaan pengamanan informasi melalui system persandian,
3. Kemampuan SDM Persandian yang belum memadai

C. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2022 dari pagu anggaran sebesar Rp **53.850.801.432,-** telah direalisasikan sebesar Rp. **49.242.796.942,-** atau sebesar 91,44 %. Dengan rincian per program dan sasaran strategis sebagai berikut :

No	Program/Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Komitmen dan Integritas Aparatur dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.000.000,-	116.961.373,-	97,47
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000,-	49.676.760,-	99,35
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,-	48.426.200,-	96,85
	d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	525.000.000,-	408.569.214,-	77,82
	e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	7.043.400.000,-	6.738.342.646,-	95,67
	f. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.091.884.322,-	1.025.334.803,-	93,91
	g. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350.000.000,-	345.228.991,-	98,64
	h. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	75.000.000,-	74.674.000,-	99,57
	i. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,-	20.000.000,-	100

j. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	250.000.000,-	235.441.400,-	94,18
k. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	500.000.000,-	407.545.200,-	81,51
l. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.301.800.000,-	1.089.519.497,-	83,69
m. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	364.240.000,-	312.804.751,-	85,88
n. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.040.000.000,-	793.630.350,-	76,31
o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000,-	121.029.925,-	85,23
p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.000.000,-	94.882.004,-	75,91
q. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,-	19.868.732,-	99,34
r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.550.000.000,-	695.091.143,-	44,84

2.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Terwujudnya penyebaran informasi bagi masyarakat.			
	a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	400.000.000,-	220.399.916,-	55,10
	b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8.790.000.000,-	8.767.357.564,-	99,96
	c. Pelayanan Informasi Publik	1.900.000.000,-	459.003.888,-	24,16
	d. Pelayanan Informasi Publik (UPTD Radio)	2.500.000.000,-	2.389.913.525,-	95,60
	e. Layanan Hubungan Media	1.550.000.000,-	1.529.681.880,-	98,69
	f. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	200.000.000,-	138.081.195,-	69,04
	g. Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.050.000.000,-	902.285.162,-	85,93
3.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Meningkatnya penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat			
	a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7.185.000.000,-	6.979.554.527,-	97,14
	b. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	3.025.517.110,-	2.946.667.417,-	97,39
	c. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	50.000.000,-	43.695.670,-	87,39
	d. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.166.960.000,-	1.102.244.187,-	94,45
	e. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	10.430.000.000,-	10.347.418.078,-	99,21
	f. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	335.000.000,-	276.081.826,-	82,41
	g. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	50.000.000,-	48.355.838,-	96,71

4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang Lengkap dan Akurat a. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi b. Pengembangan Infrastruktur	 100.000.000,- 400.000.000,-	 98.905.990,- 297.925.370,-	 98,91 74,48
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Terselenggaranya urusan persandian a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah daerah Kabupaten / Kota	 100.000.000,-	 98.197.920,-	 98,20
	Total	53.850.801.432,-	49.242.796.942,-	91,44

Efektifitas Penggunaan Dana

Dibandingkan dengan realisasi Anggaran yang dicapai tahun 2022 maka realisasi kinerja sebesar 99,6% dibandingkan dengan realisasi Anggaran sebesar 91,44% menunjukkan adanya efektifitas realisasi Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 sebagai cerminan dari hasil kinerja dari DISKOMINFO selama satu tahun dengan mengukur melalui pencapaian kinerja yang ditetapkan berdasarkan dokumen perjanjian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi dalam setiap gerak dan aktivitas pembangunan guna menciptakan Good Governance.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 secara umum untuk penyerapan anggaran sebesar 91,44 %.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2022 adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, walaupun secara kuantitas terbatas, dukungan kemampuan dan usaha personil juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2022.

B. Langkah Perbaikan dalam rangka Peningkatan Kinerja pada Tahun Mendatang

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah antara lain :

1. Belum maksimalnya infrastruktur telekomunikasi di beberapa Perangkat Daerah dan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur
2. Perlu Adanya Peningkatan peran Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik

3. Belum terkoordinirnya dengan baik pemanfaatan teknologi dan sistem Informasi antar OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Belum Optimalnya penyelenggaraan urusan Persandian dalam upaya peningkatan keamanan informasi.
5. Belum optimalnya SDM baik dari segi Kuantitas Maupun Kualitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Beberapa langkah strategis yang sekarang telah dilakukan dan akan terus dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur pada tahun-tahun mendatang antara lain adalah :

1. Peningkatan koordinasi lintas OPD untuk menyamakan persepsi dalam hal penggunaan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi sehingga akan diharapkan terjadi sinergi di antara OPD dalam penerapan e-Government/ SPBE dan mewujudkan Smart City.
2. Peningkatan Usaha Penyebarluasan Informasi kepada masyarakat.
3. Perlunya review Master Plan Jaringan Telekomunikasi (Cell Plan).
4. Memaksimalkan peningkatan kerjasama dengan operator telekomunikasi untuk mengatasi permasalahan layanan telekomunikasi di daerah.
5. Perlunya peningkatan kompetensi SDM dalam pemanfaatan TIK, Persandian dan Statistik.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih terdapat kekurangan atas laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan kami perbaiki ditahun berikutnya.

Sangatta, Januari 2023

Kepala Dinas


Ery Mulyadi, SP, MM
Pembina Tk. I / IVb
Nip 19770427 200112 1 003

